

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dan, arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5.1. Strategi Setda Provinsi Jawa Tengah

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- 1). Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset,
- 2). Peningkatan peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan,
- 3). Peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri,
- 4). Peningkatan peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 5). Peningkatan peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat,
- 6). Peningkatan peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian,
- 7). Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum,
- 8). Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program,
- 9). Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan dengan sumber dana bantuan keuangan,
- 10). Peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan,

- 11). Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota,
- 12). Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota,
- 13). Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIIH,
- 14). Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum,
- 15). Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM,
- 16). Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan,
- 17). Optimalisasi pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota,
- 18). Optimalisasi pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota,
- 19). Peningkatan pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan publik,
- 20). Optimalisasi fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah,
- 21). Peningkatan pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
- 22). Peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- 23). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 24). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat
- 25). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian,
- 26). Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa
- 27). Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa
- 28). Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa

- 29). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset,
- 30). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 31). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum,
- 32). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat
- 33). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian
- 34). Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran,
- 35). Peningkatan fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota, dan
- 36). Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan.

5.2. Arah Kebijakan Setda Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- 1). Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah,
- 2). Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah,
- 3). Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah,
- 4). Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan
- 5). Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah			1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah, 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah, 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah, 4) Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan 5) Peningkatan sinergi dan efektivitas pembangunan daerah.
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	
		Peningkatan peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan	
		Peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Peningkatan peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	
		Peningkatan peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian	
		Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum	
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program	
		Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan dengan sumber dana bantuan keuangan	
		Peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan	
		Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota	
		Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH	
		Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum	
		Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM	
		Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan	
		Optimalisasi pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota	
		Optimalisasi pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota	
		Peningkatan pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan publik	
		Optimalisasi fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah	
		Peningkatan pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
		Peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat	
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian	
		Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa	
		Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa	
		Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran	
		peningkatan fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan	